BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sampai saat ini semakin pesat dan terus berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap adaptif terhadap era digital seperti saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki. Menurut Wuryanta (Mardiyani dkk., 2020) mengartikan digitalisasi sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah *string* elektronik dari nol dan satu *bit*. Dengan pelaksanaan Digitalisasi mampu mempermudah sistem tata kelola informasi terkait yang bisa disimpan di berbagai media digital, seperti *compact disc, hard disc,* serta *flashdisk* dan bisa ditransfer ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat melalui jaringan telekomunikasi yang berupa internet (Mardiyani dkk., 2020).

Di era digital saat ini, masyarakat harus mengutamakan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, tingkat kecanggihan teknologi informasi (TI) suatu negara sering dipandang sebagai indikator utama perkembangannya. Castell (Wibisono dkk., 2021) mengatakan kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Mulai dari mengatur pemerintahan hingga mengatur kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, bahkan dalam bidang pembangunan desa. Sebagai wilayah terkecil dari negara, desa harus mulai memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi desa sesuai dengan perkembangan gagasan pembangunan desa berbasis teknologi informasi yang sering disebut dengan digitalisasi desa (Widianita, 2023). Dari data

indeks perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia per tahun 2023 adalah sebesar 5,90 (dari skala 1-10) dan data tersebut selalu meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan 2023.

Grafik 1
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Grafik diatas merupakan gambaran indeks peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. BPS menjelaskan bahwa indeks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dan terus meningkat tiap tahunnya. Kemudian berdasarkan pada metode perhitungan indeks terbaru oleh *International Telecommunication Union* (ITU) yang merupakan organisasi yang telah mengembangkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi bahwa dari skala 0-100 nilai untuk perkembangan TIK di Indonesia adalah sebesar 82,8 dan berada di urutan 80 dari 170 Negara. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi cukup baik.

Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan berada pada garis terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Pusat (Saidin, Wati dan Pratama, 2024). Berdasarkan data yang diambil Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa di Indonesia memiliki total desa sebanyak 84.048 per tahun 2024 yang terakhir di *update* pada 24 September 2024.

Tabel 1
Jumlah Desa di Indonesia
Tahun 2024

Provinsi	Jumlah Desa	Provinsi	Jumlah Desa
Aceh	6.516	Kalimantan Tengah	1.574
Sumatera Utara	6.113	Kalimantan Selatan	2.015
Sumatera Barat	1.256	Kalimantan Timur	1.038
Riau	1.867	Kalimantan Utara	484
Jambi	1.585	Sulawesi Utara	1.838
Sumatera Selatan	3.278	Sulawesi Tengah	2.020
Bengkulu	1.514	Sulawesi Selatan	3.060
Lampung	2.654	Sulawesi Tenggara	2.292
Kepulauan Bangka Belitung	393	Gorontalo	732
Kepulauan Riau	419	Sulawesi Barat	650
DKI Jakarta	267	Maluku	1.248
Jawa Barat	5.957	Maluku Utara	1.198
Jawa Tengah	8.563	Papua Barat	969
DI Yogyakarta	438	Papua Barat Daya	1.018
Jawa Timur	8.494	Papua	1.029
Banten	1.552	Papua Selatan	690
Bali	717	Papua Tengah	1.208
Nusa Tenggara Barat	1.166	Papua Pegunungan	2.634
Nusa Tenggara Timur	3.442	**Total Desa di Indonesia**	**84.048**
Kalimantan Barat	2.151		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Pemerintah Desa sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tugas untuk mengelola suatu wilayah desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. Dalam hal ini, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta hak sipil tiap warga negara Indonesia yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, pemerintah desa juga berperan penting dalam peningkatan dan kemajuan terhadap suatu desa dimana dalam upaya peningkatan kualitas layanan tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan dan melakukan peningkatan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pelayanan publik serta melaksanakan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, yakni tata pemerintahan desa yang transparan (Vina, 2020).

Dalam penerapan layanan pemerintah desa berbasis digital atau yang lebih dikenal dengan istilah konsep Desa Digital itu merupakan sebuah konsep dimana pemerintah desa melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam aspek kehidupan masyarakat di desa secara komprehensif. Tujuan dari penerapan konsep Desa Digital ini sendiri adalah untuk membantu peningkatan pembangunan di desa, mempermudah akses terhadap pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing desa. Konsep Desa Digital ini menyangkut infrastruktur digital, layanan digital, ekonomi digital dan pemberdayaan masyarakat. Bagi pemerintah desa, penerapan konsep Desa Digital ini berperan penting dalam pengelolaan data masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitor

dan pengevaluasian perkembangan desa itu sendiri (Nasution, Delima dan Prasetyo, 2024).

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan pada *website* PANRB yang dikelola oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pada saat ini Indonesia telah memperlihatkan peningkatan dalam penerapan *e-government* pada sistem tata kelola pemerintahannya dan berhasil memperlihatkan perubahan yang signifikan, yang mana tentunya ini merupakan sebuah kemajuan positif tersendiri terhadap transformasi digital pemerintah Indonesia. Pada *UN E-Government Survey* 2024 penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat 107 negara di dunia, peringkat 88 di tahun 2020, kemudian di tahun 2022 menempati peringkat 77 dan pada tahun 2024 Indonesia menjadi peringkat 64 diantara 193 Negara anggota PBB. Abdul Azwar Anas menyatakan bahwa “Peningkatan capaian ini merupakan komitmen Indonesia dalam transformasi digital pemerintah melalui pembangunan berkelanjutan. Dan kita selalu optimis, cita-cita bangsa Indonesia untuk menghadirkan pelayanan publik semakin mudah diakses akan terwujud melalui keterpaduan layanan digital”. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencetak skor 0,7991 yang membuatnya masuk ke dalam kategori *Very High E-Government Development Index* (PANRB).

Dengan adanya penerapan sistem tata kelola berbasis digital atau *e-government* ini juga memberikan keunggulan tersendiri kepada desa yang menerapkannya. Salah satu desa yang berhasil menerapkan tata Kelola *e-government* ini adalah Desa Sabuai yang terletak di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1
Juara I Lomba Desa Berprestasi Tingkat Nasional



Sumber: Sabuai, 2025.

Desa Sabuai ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2024, Desa Sabuai meraih Juara I pada lomba desa berprestasi tingkat nasional pada acara Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024.

Gambar 2
Penghargaan Desa Terinovatif



Sumber: Sabuai, 2025.

Kemudian pada tahun 2025 Desa Sabuai Kembali menerima penghargaan sebagai Desa Terinovatif di Kecamatan Kumai karena berhasil meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan mengembangkan berbagai inovasi mulai dari sistem administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan potensi desa, terkhususnya pada sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan prestasi yang diraih tersebut memperlihatkan bahwa Desa Sabuai berhasil dalam menerapkan *e-government* dalam sistem tata Kelola pemerintah desanya (Sabuai, 2025).

Pemanfaatan terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu solusi dalam mempermudah pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam layanan publik adalah dengan mendigitalkan sistem pelayanan yang ada di desa. Dengan demikian, pemberian layanan dengan konsep *e-government* akan meningkat serta pemerintah dapat memberikan pelayanan secara optimal (Saidin, Wati, dan Pratama, 2024).

Akan tetapi penerapan terhadap teknologi informasi dan komunikasi itu belum optimal terlebih lagi di wilayah pedesaan yang mempunyai keterbatasan akan pengetahuan dan akses internet. Dalam upaya penerapan digitalisasi layanan, ada beberapa hal yang menjadi penghambat serta permasalahan yang dihadapi oleh desa ketika ingin beralih ke digital.

Dari permasalahan layanan tersebut PT. Digital Desa Indonesia muncul untuk memberikan solusi kepada desa untuk membantu peningkatan pelayanan dalam tata kelola pemerintah desa. PT. Digital Desa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan DIGIDES merupakan sebuah perusahaan penyedia *platform* layanan administrasi pemerintah desa berbasis digital yang ada di Indonesia dengan kantor pusat yang terletak di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana saat ini sudah memiliki jangkauan layanan sebanyak 2.897 desa aktif yang menggunakan layanan DIGIDES di Indonesia dari data yang peneliti dapatkan pada *website* profil perusahaan (DIGIDES, 2025). Perusahaan ini

mempunyai layanan berupa *platform* sistem informasi yang telah dirancang guna untuk memudahkan *user* atau perangkat dan staf desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 2
Desa Pengguna Layanan DIGIDES

Provinsi	Jumlah Desa	Provinsi	Jumlah Desa
Aceh	106	Nusa Tenggara Timur	68
Sumatera Utara	65	Kalimantan Barat	316
Sumatera Barat	56	Kalimantan Tengah	39
Riau	31	Kalimantan Selatan	51
Jambi	101	Kalimantan Timur	55
Sumatera Selatan	65	Kalimantan Utara	8
Bengkulu	87	Sulawesi Utara	45
Lampung	44	Sulawesi Tengah	174
Kepulauan Bangka Belitung	39	Sulawesi Selatan	419
Kepulauan Riau	21	Sulawesi Tenggara	169
DKI Jakarta	0	Gorontalo	44
Jawa Barat	257	Sulawesi Barat	181
Jawa Tengah	103	Maluku	32
DI Yogyakarta	8	Maluku Utara	57
Jawa Timur	135	Papua Barat	9
Banten	51	Papua	15
Bali	11	Papua Tengah	1
Nusa Tenggara Barat	30	**Total Desa di Indonesia**	**2.897**

Sumber: DIGIDES, 2025.

Data diatas menunjukkan jumlah desa pengguna sistem layanan DIGIDES yang tersebar di beberapa wilayah provinsi desa dan dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya memiliki persentase perbandingan yaitu 3,45% dari total 84.048 jumlah desa yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Taufiq Al-Hidayah selaku *Digital Consultant* pada PT. Digital Desa Indonesia yang

dilakukan oleh peneliti pada saat pra-penelitian menyatakan bahwa alasan mengapa konsep Desa Digital ini perlu dibuatkan dalam bentuk video promosi adalah dikarenakan penggambaran atau bentuk visualisasi akan konsep penerapan Desa Digital itu belum ada dalam lingkup perusahaan atau *startup* sejenis. Hal tersebut bertujuan guna menjelaskan kepada masyarakat, terkhususnya staf dan perangkat desa terkait apa saja yang akan mereka dapatkan ketika Desa Digital ini terapkan di desa mereka. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional Indonesia dengan memberikan informasi dan edukasi mulai dari desa. Pada wawancara ini juga beliau menyampaikan bahwa alasan mengapa sistem layanan DIGIDES belum dapat menjangkau dan mengajak seluruh desa yang berada di Indonesia untuk beralih ke sistem tata kelola layanan digital diantaranya adalah faktor Internet yang belum merata, pemahaman tentang digitalisasi yang masih kurang serta faktor program prioritas kabupaten. Hal ini menyebabkan DIGIDES belum mampu untuk menjangkau seluruh desa di Indonesia.

Pada uraian diatas telah dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah minimnya pengetahuan terkait digitalisasi, kurangnya akses internet di wilayah desa terpencil, serta faktor sosial yang mempengaruhi adopsi teknologi yang saat ini sehingga masih banyak desa yang memberikan pelayanan dengan sistem konvensional yang tidak sederhana dan terbilang rumit dalam memberikan layanan yang sifatnya administratif.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Zidan Nasution dkk., terkait penerapan *smart village* melalui *smart* desa menyatakan bahwa penerapan sistem layanan tata kelola pemerintah desa berbasis digital itu belum dapat berjalan dengan optimal dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia tentang digitalisasi pada pegawai desa dan masyarakat sehingga pada

lokus penelitian belum dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan di desa lokasi penelitian (Nasution, Isniyunissyafna dan Eko, 2024).

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti mengangkat topik penelitian strategi promosi dengan judul penelitian yaitu "**Efektivitas Video Promosi *Desa Digital* Studi pada PT. Digital Desa Indonesia**" agar dapat membantu lokus penelitian dalam memberikan gambaran yang jelas terkait konsep Desa Digital kepada perangkat dan staf pemerintah desa dalam penerapan digitalisasi terhadap pemberian layanan publik pada masyarakat guna pengoptimalisasian penggunaan sistem layanan berbasis digital sehingga dapat menjadi strategi promosi baru DIGIDES.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas video promosi desa digital yang dilakukan pada PT. Digital Desa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas video promosi Desa Digital yang dilakukan pada PT. Digital Desa Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, manfaat teoritis yang diharapkan nantinya adalah penelitian ini mampu dijadikan sebagai acuan referensi dalam menghadapi

permasalahan yang berkaitan dengan konsep strategi promosi yang dilakukan perusahaan, dalam hal ini PT. Digital Desa Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah mampu memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperkenalkan konsep produk ke konsumen mereka agar pengimplementasian sistem layanan mereka bisa lebih optimal.